



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542
Fax (021) 3450038 www.kemendagri.go.id Email: biro_kepegawaian@kemendagri.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2/3928/SJ**

**TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran (T.A) 2024 untuk ditugaskan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

A. Jumlah Alokasi Kebutuhan PNS

Alokasi Kebutuhan PNS Kementerian Dalam Negeri T.A 2024 sejumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) kebutuhan dengan rincian sebagaimana tercantum pada **lampiran I pengumuman ini**.

B. Penempatan Alokasi Kebutuhan PNS

Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan PNS meliputi:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
4. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
7. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
8. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang;
9. Balai Pemerintahan Desa di Lampung;
10. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
12. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung;
15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
16. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar;
17. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta;
18. Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
20. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua;
21. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan;
22. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Utara;
23. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

24. Pos Lintas Batas Negara Aruk;
25. Pos Lintas Batas Negara Badau;
26. Pos Lintas Batas Negara Entikong;
27. Pos Lintas Batas Negara Mota'ain;
28. Pos Lintas Batas Negara Motamasin;
29. Pos Lintas Batas Negara Skouw;
30. Pos Lintas Batas Negara Wini;
31. Pos Lintas Batas Negara Sota;
32. Pos Lintas Batas Negara Serasan;
33. Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang;
34. Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk;
35. Pos Lintas Batas Negara Napan; dan
36. Pos Lintas Batas Negara Yetetkun.

C. Deskripsi Tugas Jabatan

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PNS Kementerian Dalam Negeri T.A 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
1	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
4	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
5	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
6	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
7	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
8	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
9	AUDITOR AHLI PERTAMA	Melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,	

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
		pengendalian, dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
10	PENERJEMAH AHLI PERTAMA (BAHASA INGGRIS)	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan bahasa inggris sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	Wajib Sertifikat TOEFL/IELTS
11	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
12	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
13	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
14	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
15	PERENCANA AHLI PERTAMA	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
16	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
17	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.	
18	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
19	STATISTISI AHLI PERTAMA	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan Kegiatan Statistik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
20	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial sesuai uraian	

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
		kegiatan jenjang Ahli Pertama	
21	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	
22	DOKTER AHLI PERTAMA (SPESIALIS PATOLOGI KLINIK)	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan kepada masyarakat pada bidang spesialis patologi klinik sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	Wajib STR dokter spesialis sesuai jenis spesialisasinya
23	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	Wajib STR (bukan STR Internship)
24	APOTEKER AHLI PERTAMA	Melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoeкономи dan uji klinik sesuai uraian	Wajib STR

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
		kegiatan jenjang Ahli Pertama	
25	PERAWAT AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama	Wajib STR
26	NUTRISIONIS TERAMPIL	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit sesuai uraian kegiatan jenjang terampil	Wajib STR
27	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang terampil	Wajib STR
28	FASILITATOR PEMERINTAHAN	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	
29	KONSELOR SDM	Memberikan layanan bimbingan dan konseling	
30	PAMONG PEMERINTAHAN	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	
31	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi pemerintah	
32	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan	

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	KETERANGAN
		sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	
34	PENATA KEPROTOKOLAN	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	
35	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	
36	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	

II. KRITERIA PELAMAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. **Pelamar Umum** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
3. **Putra/Putri Papua** adalah pelamar yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua dan/atau orang yang diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku; dan
4. **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang berasal dari Kabupaten/Kota di Kalimantan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.

III. PERSYARATAN PELAMAR PNS

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal:
 - 1) 2,85 (dua koma delapan lima dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4 untuk jenjang pendidikan Diploma III (D-III) dan Sarjana/Diploma IV (S-1/D-IV) ;
 - 2) 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4 untuk jenjang pendidikan Magister (S-2);
 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenis;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan Instansi Pemerintah;
12. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan

15. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pejabat yang Berwenang.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar Umum

- a. Pelamar pada kebutuhan jabatan Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Inggris dengan kualifikasi pendidikan bahasa inggris/sastra inggris, harus memiliki kemampuan bahasa inggris yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat hasil TOEFL ITP 500/TOEFL iBT 61 /IELTS 6,0 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org).
- b. Pelamar pada kebutuhan jabatan Dokter Ahli Pertama Spesialis Patologi Klinik dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar.
- c. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

2. Pelamar Khusus

a. **Pelamar Penyandang Disabilitas** dengan ketentuan:

- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- 2) Bagi pelamar **penyandang disabilitas mental**, melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1 paling sedikit memuat:
 - (a) diagnosis gangguan jiwa;
 - (b) perjalanan gangguan;
 - (c) riwayat terapi, baik farmakologis/obat (jenis obat, dosis, respons terapi, dan efek samping) maupun nonfarmakologis (jenis terapi, respons terapi), dan terapi yang dibutuhkan saat ini;
 - (d) gambaran dampak gangguan dan manfaat terapi terhadap derajat fungsi pelamar, termasuk aktivitas dasar sehari-hari (*activities of daily living*), relasi sosial, riwayat performa pendidikan dan/atau pekerjaan (bila ada), dan fungsi lain yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar;
 - (e) faktor kerentanan (predisposisi) dan pemicu (presipitasi) kekambuhan/perburukan gejala; dan
 - (f) faktor protektif dan potensi lain yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar.
- 3) Menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan masker);
- 4) Bagi pelamar **penyandang disabilitas mental**, menyampaikan tautan video singkat sebagaimana dimaksud angka 3 paling sedikit memuat:
 - (a) pengenalan diri;
 - (b) deskripsi/gambaran diri, termasuk kelebihan dan kekurangan yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar, penjelasan bagaimana akan melakukan pekerjaan, kemampuan manajemen tugas, kemampuan bekerja dalam tim, resolusi konflik sertaantisipasi atas tantangan yang mungkin akan dihadapi.

- b. **Pelamar Putra/putri Papua**, dengan ketentuan:
 - 1) Melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) Melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- c. **Pelamar Putra/Putri Kalimantan** dengan ketentuan melampirkan Kartu Tanda Penduduk di Kalimantan/Kota Kalimantan pada data pembuatan akun SSCASN.

IV. PELAMARAN

A. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* pada SSCASN, dengan alur sebagai berikut:

- 1) Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Mengisi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Mengisi password akun SSCASN dan pertanyaan pengaman;
 - d. Mengunggah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan Pengganti KTP-el/Surat Keterangan Perekaman Data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Mengunggah swafoto dan melakukan pengecekan ulang data;
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
- 2) Pelamar login ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- 3) Pelamar melengkapi data diri yang valid;
- 4) Pelamar memilih instansi Kementerian Dalam Negeri dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi kebutuhan, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- 5) Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 6) Pelamar memastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 7) Pelamar menyimpan data yang telah diperiksa pada "*Resume Pendaftaran*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
- 8) Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

B. Dokumen Persyaratan

- a. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran yang dapat diunggah pada SSCASN serta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan dalam bentuk *softcopy* yang meliputi:
 - 1) pasfoto berwarna dan terbaru paling lama 6 bulan terakhir ukuran 4 x 6 dengan ketentuan berlatar belakang merah, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri dan bukan swafoto;
 - 2) KTP-el/Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang masih berlaku/Surat Keterangan Perekaman data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - 3) ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - 4) transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan;

- 5) surat lamaran diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan menggunakan e-meterai 10.000. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal pada saat melakukan pendaftaran *online* (**format surat lamaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II pengumuman ini**);
 - 6) surat Pernyataan Data Diri pelamar diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan yang sudah ditandatangani dan menggunakan e-meterai 10.000 (**format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III pengumuman ini**);
 - 7) ijazah asli yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 - 8) sertifikat atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar yang diunduh melalui Direktori Hasil dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (Pusdiknakes/LAM-PTKes);
 - 9) sertifikat hasil TOEFL ITP 500/ TOEFL iBT 61/IELTS 6,0 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Inggris dengan kualifikasi pendidikan bahasa inggris/sastra inggris;
 - 10) surat tanda registrasi (STR) sesuai jenis jabatan fungsional kesehatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 11) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar Penyandang Disabilitas;
 - 12) akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku bagi pelamar Putra/Putri Papua; dan
 - 13) KTP-el Kabupaten/Kota di Kalimantan bagi pelamar Putra/Putri Kalimantan.
- b. Pelamar dapat membuat akun dan membeli e-meterai sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dan angka 6 pada laman <https://e-meterai.co.id>;
 - c. Seluruh dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diwajibkan asli, berwarna/ bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca;
 - d. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam **lampiran IV pengumuman ini**.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi adalah pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang dikirimkan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara terbuka melalui portal <https://infocasn.kemendagri.go.id>.

- c. Pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Ketua Panitia Seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dan mengumumkan ulang hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - b. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi yang disusun oleh Panselnas Pengadaan ASN.
 - c. Pelamar yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS T.A 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN T.A 2023 pada SSCASN.
 - d. Pelamar dapat memilih menggunakan Nilai SKD T.A 2023 pada seleksi pengadaan PNS T.A 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi T.A 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi T.A 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi T.A 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi T.A 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD T.A 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
 - e. Pelamar yang memilih menggunakan nilai SKD T.A 2023 tidak dapat mengikuti SKD T.A 2024.
 - f. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD T.A 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD T.A 2024.
 - g. Dalam hal pelamar seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
 - h. Pelamar yang menggunakan nilai SKD T.A 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD T.A 2024 dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
 - i. Pengumuman hasil SKD dilakukan melalui portal <https://infocasn.kemendagri.go.id>.
 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan dengan menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
 - b. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, sedangkan untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh Instansi Teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional

terkait dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

4. Pengumuman Hasil Akhir
 - a. Pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 secara terbuka berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.
 - b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - c. Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, Panitia Seleksi melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
 - d. Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - e. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Dalam Negeri saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - f. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
 - g. pelamar wajib mengikuti pemberkasan akhir guna penelitian berkas dalam rangka proses pengusulan nomor induk CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Apabila setelah penentuan kelulusan akhir terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tidak memenuhi persyaratan seleksi, atau meninggal dunia, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan; dan
 - i. Apabila pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan nomor induk CPNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Seleksi Pengadaan ASN untuk 2 (dua) Tahun Anggaran berikutnya.

VI. SISTEM KELULUSAN TAHAPAN SELEKSI

1. Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang telah diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan pelamar yang lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti SKD.
2. Penentuan kelulusan bagi pelamar yang mengikuti SKD ditetapkan berdasarkan Nilai Ambang Batas (*passing grade*) kelulusan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.

3. Pengumuman Kelulusan hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat terbaik dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
4. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
5. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud angka 4 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB.
6. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas dengan ketentuan SKD dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan SKB dengan bobot 60% (enam puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud angka 6 penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada:
 - a. Nilai Kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf a sama penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud huruf b masih sama penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister yang tertulis di ijazah; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
8. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud angka 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
9. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar wajib memantau seluruh proses tahapan seleksi melalui portal Panselnas dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dan portal ASN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan alamat <https://infocasn.kemendagri.go.id>;

2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan waktu pelaksanaan seleksi diberlakukan sama dengan pelamar pada kebutuhan umum atau khusus lainnya;
3. Dokumen pelamaran yang telah diunggah tidak dapat diperbaiki jika pelamar mengklik akhiri pendaftaran sesuai mekanisme SSCASN;
4. Kesalahan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh pelamar dapat **menggugurkan** keikutsertaan pada Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri T.A 2024;
5. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 hanya menerima pendaftaran secara daring melalui portal SSCASN dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
6. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dikarenakan ketidaklengkapan administrasi dan/atau kelalaian mengikuti jadwal pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dinyatakan gugur;
7. Pelamar dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
8. Pelamar, keluarga, dan/atau pihak terkait dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan pegawai ASN, apabila pelamar terbukti melakukan kecurangan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
9. Kementerian Dalam Negeri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Kementerian Dalam Negeri atau Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;
10. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri ini **tidak dipungut biaya**;
11. Seluruh keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri adalah **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri T.A 2024 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 50958800 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 – 16.00 WIB dan *Help Desk* Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri T.A 2024 dengan alamat <https://infocasn.kemendagri.go.id> atau <https://kemendagri.lapor.go.id>.

Jakarta, 19 Agustus 2024

**Pjt. SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU KETUA PANITIA
SELEKSI PENGADAAN PNS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2024**



Komjen Pol. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si

RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
JUMLAH				7	2	13	304	326	
1	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH BAGIAN PERENCANAAN
2	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
3	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SUBBAGIAN TATA USAHA
4	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG
5	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK				1	1	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI BAGIAN PERENCANAAN
6	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BAGIAN PERENCANAAN
7	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM	1		1	1	3	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
8	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TIM PEMERIKSA DAERAH SUBBAGIAN FASILITASI TIM PEMERIKSA DAERAH WILAYAH II
9	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN KEPEGAWAIAN
10	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM	1			1	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERSIDANGAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
11	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
12	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN
13	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
14	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN VERIFIKASI PENGADUAN I
15	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN PENJADWALAN DAN PEMANGGILAN PERSIDANGAN
16	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM	1			1	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN HUKUM SUBBAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
17	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN VERIFIKASI PENGADUAN II
18	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIRO ADMINISTRASI HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA
19	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PERENCANAAN
20	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TIM PEMERIKSA DAERAH SUBBAGIAN FASILITASI TIM PEMERIKSA DAERAH WILAYAH I
21	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TIM PEMERIKSA DAERAH

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
22	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
23	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
24	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 MANAJEMEN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
25	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PENYIAPAN MATERI SUBBAGIAN MATERI KEBIJAKAN
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER				2	2	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN INOVASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
27	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				2	2	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
28	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
29	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				2	2	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, KEUANGAN DAERAH DAN DESA
30	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 SOSIOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ANTROPOLOGI				2	2	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN KEWILAYAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN PUBLIK
31	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN
32	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA		S-1 AKUNTANSI / D-IV KEUANGAN PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PAJAK				1	1	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI BAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN VERIFIKASI KEUANGAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
33	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / D-IV KEUANGAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN
34	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 SAINS INFORMASI / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL YOGYAKARTA
35	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR
36	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUBDIREKTORAT WILAYAH III
37	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG SUBBAGIAN TATA USAHA
38	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUBDIREKTORAT WILAYAH II
39	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
40	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
41	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGIAN UMUM SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
42	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUBDIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM
43	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA
44	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK				2	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
45	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUBDIREKTORAT WILAYAH I
46	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		S 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN ASISTEN DEPUTI POTENSI KAWASAN PERBATASAN DARAT

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
47	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT BINA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUBDIREKTORAT WILAYAH IV
48	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI
49	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN	1			1	2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
50	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI
51	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1			1	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT
52	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA YETETKUN SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
53	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S 1 ADMINISTRASI BISNIS / S 1 ARSITEKTUR / S-1 AKUNTANSI / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT FASILITASI PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN ASET PEMERINTAHAN DESA SUBBAGIAN TATA USAHA
54	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ENTIKONG SUB BIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
55	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S 1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMPUTER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG SUBBAGIAN TATA USAHA
56	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA NAPAN SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
57	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTA'AIN SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
58	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN SKOUW SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
59	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 AKUNTANSI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
60	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
61	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA SEI NYAMUK SUB BIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
62	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 KEARSIPAN / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 AKUNTANSI / S 1 EKONOMI / S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
63	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S 1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN WINI SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
64	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ARUK SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
65	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S 1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN SOTA SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM & FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
66	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
67	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN SUBBAGIAN PERSURATAN
68	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KEARSIPAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
69	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
70	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S 1 KEARSIPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN ASISTEN DEPUTI POTENSI KAWASAN PERBATASAN DARAT
71	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ARSITEKTUR / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
72	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN BADAU SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
73	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		D IV KEARSIPAN DIGITAL / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ARSITEKTUR / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 AKUNTANSI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT FASILITASI KERJASAMA, LEMBAGA PEMERINTAH DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUBBAGIAN TATA USAHA
74	ARSIPARIS AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTAMASIN SUBBIDANG FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
75	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA		S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
76	AUDITOR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT KHUSUS
77	AUDITOR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL				2	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV
78	AUDITOR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL				2	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT II

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
79	AUDITOR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL				2	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT III
80	AUDITOR AHLI PERTAMA		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV AKUNTANSI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
81	AUDITOR AHLI PERTAMA		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 TEKNIK SIPIL				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN ANALISIS, EVALUASI, DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN
82	AUDITOR AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI BISNIS / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I
83	FASILITATOR PEMERINTAHAN		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI
84	FASILITATOR PEMERINTAHAN		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI
85	FASILITATOR PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
86	KONSELOR SDM		S 1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN
87	KONSELOR SDM		S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN DISIPLIN, KINERJA DAN PENGHARGAAN
88	KONSELOR SDM		S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN UMUM SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
89	PAMONG PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL / D-IV POLJTIK INDONESIA TERAPAN / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 SAINS POLITIK / S-1 STUDI PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN UMUM SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
90	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN ASET BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SUBBAGIAN VERIFIKASI
91	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEUANGAN DAN ASET BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
92	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
93	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
94	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
95	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN
96	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL
97	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PENYIAPAN MATERI SUBBAGIAN MATERI RAPAT

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
98	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S 1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
99	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S 1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S 1 SISTEM INFORMASI / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
100	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S 1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL
101	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
102	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S 1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
103	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S 1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA
104	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
105	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S 1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN
106	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S 1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI
107	PENATA KEPROTOKOLAN		D IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA
108	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
109	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG SUBBAGIAN TATA USAHA
110	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA UNIT LABORATORIUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
111	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S 1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN FASILITASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SUBBAGIAN FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
112	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI			1	1	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
113	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN ANALISIS, EVALUASI, DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN
114	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				2	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV
115	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT II
116	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				2	2	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT KHUSUS
117	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA		D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 AKUNTANSI				1	1	INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT III
118	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU		S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN VERIFIKASI PENGADUAN I
119	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU		S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN VERIFIKASI PENGADUAN II
120	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU		S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN FASILITASI PENYIAPAN PERKARA
121	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU		S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN RISALAH SIDANG DAN PENYUSUNAN PUTUSAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
122	PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU		S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN TINDAKLANJUT PUTUSAN
123	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN SKOUW SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
124	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ARUK SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
125	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN WINI SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
126	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ENTIKONG SUB BIDANG ADMINISTRATION UMUM
127	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTAMASIN SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
128	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SUB BIDANG ADMINISTRATION UMUM DAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
129	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN SOTA SUB BIDANG ADMINISTRATION UMUM & FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
130	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTA'AIN SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
131	PENGELOLA KEPROTOKOLAN		D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN BADAU SUBBIDANG ADMINISTRATION UMUM
132	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA BAGIAN ADMINISTRATION UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
133	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA		D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI
134	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA
135	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL YOGYAKARTA BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA
136	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA		S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN		1		1	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI
137	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN PENJADWALAN DAN PEMANGCILAN PERSIDANGAN
138	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PENGADUAN SUBBAGIAN FASILITASI PENYIAPAN PERKARA
139	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		S-1 HUKUM				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN SARANA PRASARANA DAN PENGAMANAN PERSIDANGAN
140	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		S-1 HUKUM	1			1	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN FASILITASI TEKNIS PERSIDANGAN DAN TEKNIS PUTUSAN SUBBAGIAN RISALAH SIDANG DAN PENYUSUNAN PUTUSAN
141	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
142	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
143	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
144	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIRO ADMINISTRASI HUKUM, KEPEGAWAIAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA
145	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM
146	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
147	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AHLI PERTAMA		S 1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
148	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
149	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
150	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SUBDIREKTORAT FASILITASI PENATAAN KEWENANGAN DESA DAN PRODUK HUKUM DESA
151	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA		S-1 HUKUM				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PERENCANAAN
152	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S 1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BID. PBWN
153	PERENCANA AHLI PERTAMA		D IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN BADAU SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM
154	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III SUBDIREKTORAT SOSIAL BUDAYA
155	PERENCANA AHLI PERTAMA		S 1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEK / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
156	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA JAGOI BABANG SUB BIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN
157	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 STUDI PEMBANGUNAN			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH BAGIAN PERENCANAAN
158	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA JAGOI BABANG SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM
159	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA SERASAN SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
160	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ARUK SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM
161	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ARSITEK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN				4	4	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAGIAN PERENCANAAN
162	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN TATA USAHA DEPUTI BID. PPKP

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
163	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN ENTIKONG SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM
164	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTA'AIN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM
165	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
166	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
167	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
168	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
169	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN UMUM DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
170	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA YETETKUN SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
171	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN MOTAMASIN SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM
172	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 JURNALISTIK				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH I
173	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
174	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 ARSITEK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
175	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA SEI NYAMUK SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM
176	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN BISNIS / S-1 ILMU EKONOMI				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN
177	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA SEI NYAMUK SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM
178	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II SUBDIREKTORAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
179	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN				3	3	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA
180	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN WINI SUBBIDANG ADMINISTRASI UMUM

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
181	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGIAN PERENCANAAN
182	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI NEGARA				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP
183	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 EKONOMI				2	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA
184	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN PLBN SOTA SUB BIDANG ADMINISTRASI UMUM & FASILITASI PELAYANAN LINTAS BATAS NEGARA
185	PERENCANA AHLI PERTAMA		S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PENGGAJIAN
186	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
187	PERENCANA AHLI PERTAMA		D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA BIDANG PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA NAPAN SUB BIDANG KEBERSIHAN DAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PLBN
188	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 EKONOMI				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM BAGIAN PENGAMANAN
189	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI
190	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV MANAJEMEN PRODUKSI BERITA				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
191	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN KEPEGAWAIAN
192	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV DESAIN GRAFIS / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
193	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT FASILITASI KERJA SAMA
194	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				1	1	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO KEUANGAN, UMUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA PIMPINAN SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT
195	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV DESAIN GRAFIS / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT / D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI
196	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
197	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA		D-IV KOMUNIKASI MASSA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI MASSA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
198	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS
199	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1			1	2	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGIAN PERENCANAAN
200	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
201	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA			1	4	5	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
202	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN ASISTEN DEPUTI POTENSI KAWASAN PERBATASAN DARAT
203	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SUBBAGIAN TATA USAHA
204	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
205	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN SISTEM INFORMASI SUBBAGIAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, DAN SISTEM INFORMASI

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
206	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				5	5	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN NASIONAL
207	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER				3	3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
208	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				5	5	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
209	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG SUBBAGIAN TATA USAHA
210	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
211	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA BAGIAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN KONSULTASI
212	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER				1	1	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
213	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S 1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KEPEMIMPINAN
214	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH BAGIAN PERENCANAAN
215	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S 1 SISTEM INFORMASI			1	1	2	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN
216	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 SISTEM INFORMASI			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH DIREKTORAT FASILITASI TRANSFER DAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH
217	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S 1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				5	5	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN DAERAH
218	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
219	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI				2	2	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
220	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER				2	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA
221	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
222	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S 1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN INTEGRASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI
223	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 TEKNIK KOMPUTER / S 1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS				2	2	DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT DAN UDARA
224	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS / S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI
225	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		S-1 ILMU KOMPUTER / S 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER				2	2	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
226	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA		D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S 1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI		1		1	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS PAPUA UNIT PERPUSTAKAAN
227	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA		D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PERENCANAAN UNIT PERPUSTAKAAN
228	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA		S 1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S 1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S 1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S 1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN
229	STATISTISI AHLI PERTAMA		D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S 1 SAINS DATA / S 1 SAINS DATA SPASIAL / S 1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN			1	2	3	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI
230	STATISTISI AHLI PERTAMA		D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S 1 STATISTIKA / S 1 STATISTIKA TERAPAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
231	STATISTISI AHLI PERTAMA		S 1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN / S-1 SAINS DATA SPASIAL				2	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA BAGIAN PERENCANAAN
232	STATISTISI AHLI PERTAMA		D IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
233	STATISTISI AHLI PERTAMA		D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S 1 STATISTIKA / S 1 STATISTIKA TERAPAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA
234	STATISTISI AHLI PERTAMA		D IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 STATISTIKA TERAPAN				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
235	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA		D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / S-1 GEOGRAFI / S 1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S 1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S 1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 RANCANG KOTA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOFISIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL			1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH SUBDIREKTORAT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH II

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
236	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA		D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOFISIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 RANCANG KOTA / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 ILMU LINGKUNGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH				2	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH
237	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA		D-IV PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN / D-IV SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA GEOMATIKA DAN SURVEI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 RANCANG KOTA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOFISIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL				2	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIREKTORAT TOPONIMI DAN BATAS DAERAH SUBDIREKTORAT BATAS ANTAR DAERAH WILAYAH I
238	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA		D-IV TEKNOLOGI SURVEI PEMETAAN DASAR / S-1 GEOGRAFI / S-1 SAINS DATA SPASIAL / S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI			1	1	2	SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
239	WIDYAIHWARA AHLI PERTAMA		S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 AKUNTANSI / S-2 EKONOMI / S 2 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S 2 HUBUNGAN MASYARAKAT / S 2 HUKUM / S-2 HUKUM PUBLIK / S 2 ILMU AKUNTANSI / S-2 ILMU INFORMATIKA / S-2 ILMU KOMPUTER / S 2 ILMU KOMUNIKASI / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU PEMERINTAHAN / S-2 ILMU POLITIK / S 2 INOVASI SISTEM DAN TEKNOLOGI / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN / S-2 PERENCANAAN WILAYAH / S-2 SISTEM INFORMASI / S-2 STUDI PEMERINTAHAN				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR
240	WIDYAIHWARA AHLI PERTAMA		S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 HUKUM / S-2 ILMU MANAJEMEN / S-2 ILMU PEMERINTAHAN / S-2 ILMU POLITIK / S-2 INOVASI SISTEM DAN TEKNOLOGI / S-2 KEBIJAKAN PUBLIK / S-2 MANAJEMEN / S-2 PERENCANAAN WILAYAH / S 2 STUDI PEMERINTAHAN				5	5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKITTINGGI
241	APOTEKER AHLI PERTAMA		PROFESI APOTEKER				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
242	APOTEKER AHLI PERTAMA		PROFESI APOTEKER				1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KLINIK PRATAMA POLIKLINIK DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI
243	APOTEKER AHLI PERTAMA		PROFESI APOTEKER				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KLINIK BPSDM KEMENDAGRI
244	APOTEKER AHLI PERTAMA		PROFESI APOTEKER				1	1	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KLINIK PRATAMA BPP KEMENDAGRI
245	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NO	JABATAN	SUB JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				TOTAL ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
				DISABILITAS (2%)	PUTRA/PUTRI PAPUA	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN (5%)	UMUM		
246	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR
247	NUTRISIONIS TERAMPIL		D-III GIZI				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
248	PERAWAT AHLI PERTAMA		D IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS				1	1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR
249	PERAWAT AHLI PERTAMA		D-IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS				1	1	SEKRETARIAT JENDERAL BIRO UMUM KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI
250	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		D III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT				1	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KLINIK BPSDM KEMENDAGRI

Lampiran II Pengumuman
Nomor : 800.1.2/3928/SJ
Tanggal : 19 Agustus 2024

Jakarta,

Contoh Surat Lamaran

Yth. Menteri Dalam Negeri
c.q Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN
Kementerian Dalam Negeri
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Jenjang Pendidikan :

Program Studi :

Jabatan yang dilamar :

(sesuai jabatan yang dilamar pada SSCASN)

Alamat Domisili :

Nomor Telepon :

Alamat E-mail :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai 10.000

(.....)

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor KTP/Identitas :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenis.
9. Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan.*
10. Menyandang disabilitas sesuai surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya **(Khusus Penyandang Disabilitas) ****
11. Memiliki keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu asli Papua). **(Khusus Putra/Putri Papua) *****
12. Memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan sesuai dengan data pembuatan akun SSCASN. **(Khusus Putra/Putri Kalimantan)******
13. Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar/bukan palsu.
14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

15. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
16. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; dan
17. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

e-meterai 10.000

(.....)

Catatan

1. Poin pernyataan bertanda * wajib dicantumkan bagi pelamar pada kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan sertifikat keahlian
2. Poin pernyataan bertanda ** wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
3. Poin pernyataan bertanda *** wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua.
4. Poin pernyataan bertanda *, **, *** dan **** wajib dihapus bagi pelamar kebutuhan umum yang tidak mensyaratkan sertifikat keahlian, bukan penyandang disabilitas dan bukan keturunan asli Putra/Putri Papua serta mengubah poin nomor 13 menjadi nomor 10, dan seterusnya sehingga bagi pelamar umum yang melamar pada jabatan tidak mensyaratkan sertifikat keahlian hanya terdapat 13 poin pernyataan.
5. Apabila ada poin yang tidak termuat maka pelamar dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan.

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : 800.1.2/3928/SJ
Tanggal : 19 Agustus 2024

**JADWAL PELAKSANAAN
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa sanggah	18 s.d 20 September 2024
7.	Jawab sanggah	18 s.d 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17.	Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22.	Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025

23.	Pengumuman hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25.	Jawab sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26.	Pengolahan seleksi hasil sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27.	Pengumuman pasca sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29.	Usul penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Catatan: Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

Jakarta,

**Plt. SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU KETUA PANITIA
SELEKSI PENGADAAN PNS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2024**



Konjen Pol. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si